

# **RENCANA KERJA INSPEKTORAT KOTA BANJARBARU TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**

Alamat Jln. Trikora No. 1 Gedung Serba Guna Lantai. 2  
Telp. ( 0511) 4780069 Banjarbaru 70713 Website :  
<http://inspektorat.banjarbarukota.go.id/>  
Email:inspektorat@banjarbarukota.go.id





**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**

**INSPEKTORAT**

Jalan Trikora No.1 Gedung Serba Guna Lantai 2, Telp/Fax: (0511) 4780069, Website:  
<http://inspektorat.banjarbarukota.go.id>, Email: [inspektorat@banjarbarukota.go.id](mailto:inspektorat@banjarbarukota.go.id)

**KEPUTUSAN  
INSPEKTUR KOTA BANJARBARU**

**NOMOR 012 TAHUN 2023**

**TENTANG  
RENCANA KERJA (RENJA)  
INSPEKTORAT KOTA BANJARBARU TAHUN 2024**

**INSPEKTUR KOTA BANJARBARU**

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun Rencana Kerja (Renja) dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
- b. bahwa Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kota Banjarbaru tahun 2023 ditetapkan sebagai pedoman di lingkungan Inspektorat dalam menyusun program dan kegiatan prioritas sektor pengawasan pada tahun anggaran berkenaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kota Banjarbaru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Banjarbaru tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 11);



10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 15 Tahun Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Banjarbaru
11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022;
13. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 56);
14. Surat Edaran Wali Kota Nomor: 050/204-P2E/BAPPEDA Tanggal 13 Maret 2023 Tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja SKPD Kota Banjarbaru Tahun 2024.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Inspektur Kota Banjarbaru Tentang Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Kota Banjarbaru Tahun 2024;
- KEDUA : Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Kota Banjarbaru Tahun 2024 memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja dan target kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif serta prakiraan maju Tahun 2025;



KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 14 Maret 2023

INSPEKTUR



**Drs. RAHMAT TAUFIK, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700615 199003 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Banjarbaru (Sebagai Laporan);
2. Inspektur Kota Banjarbaru;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kota Banjarbaru;
4. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Banjarbaru;
5. Semua Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kota Banjarbaru;
6. PPK dan PPTK.



**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA  
VERIFIKASI RENJA SKPD TAHUN 2024  
INSPEKTORAT KOTA BANJARBARU**

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Dua bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Ruang Rapat Utama Lantai 3 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarbaru, Jalan Pangeran Suriansyah No.16 Banjarbaru, telah dilaksanakan Verifikasi Renja Inspektorat dengan hasil sebagai berikut :

1. Kesesuaian Perencanaan (*Terlampir*)
2. Berdasarkan hasil diskusi dan pembahasan antara SKPD tersebut diatas dengan Tim Verifikator Renja, dapat disepakati bahwa :
  - a) Rumusan program dan kegiatan yang disampaikan telah mengacu dengan indikator rencana program pada RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 dan Renstra SKPD terkait Tahun 2021-2026, Permendagri 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021.
  - b) Hasil pembahasan sidang kelompok ini akan menjadi acuan dalam penyempurnaan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarbaru Tahun 2024.

Demikian Berita Acara ini dibuat berdasarkan kesepakatan bersama dan ditandatangani oleh perwakilan peserta sidang kelompok yang hadir pada hari ini.

No	Nama & Tanda Tangan	No	Nama & Tanda Tangan
1	Abd. Mulya	5	Rahmat Taufik
2	Karna	6	Furqan N.I.
3	Kaulan	7	Ritta Purnamasri
4	Hg. Rosita	8	



**LAMPIRAN BERITA ACARA KESEPAKATAN VERIFIKASI RENJA TAHUN 2024**  
**INSPEKTORAT KOTA BANJARBARU :**

**SESUAIAN PERENCANAAN**

Uraian	Cek List (Ya/Tidak)	Saran dan Masukan
sesuaian Program, Indikator dan Target Kinerja dengan RPJMD Tahun 2021 - 2026. (Matrik 7.2)	Ya	Program, Indikator Program dan Target Kinerja telah sesuai dengan RPJMD Tahun 2021-2026. (Matrik 7.2)
sesuaian Kegiatan, Indikator dan Target dengan cascading Kota.	Ya	Indikator Kinerja Hasil Kegiatan agar disesuaikan dengan Cascading Kota.
sesuaian Sub Kegiatan Indikator dan Target dengan pmendagri 050-5889 Tahun 2021.	Ya	Satuan Target Kinerja Indikator Keluaran Sub Kegiatan telah sesuai dengan Satuan Indikator Sub Kegiatan pada Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021
ulan Kegiatan Prioritas dan Musrenbang telah masuk dalam Renja.	Tidak	Tidak ada usulan Musrenbang
ah dan Bansos sesuai dengan ketentuan arat yang dipenuhi).	Tidak	Tidak ada Hibah dan Bansos
sesuaian Indikator keluaran (output) rincian belanja n objek belanja.	Ya	Target Kinerja Indikator Keluaran telah sesuai dengan objek belanja.



**catatan Penting Lainnya :**

1. Ada perbedaan target kinerja pada Renja dengan Renstra SKPD. Perbedaan target kinerja agar disesuaikan pada saat revisi atau perubahan Renstra SKPD.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia- Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kota Banjarbaru Tahun 2024 telah selesai disusun yang merupakan amanat undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Pasal 21 ayat 3 telah menyebutkan bahwa : " Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) ".

---

Rencana Kerja Inspektorat Kota Banjarbaru merupakan dokumen perencanaan yang bersifat teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari Renstra Inspektorat Kota Banjarbaru dalam aspek perencanaan pembangunan daerah, yang memuat Kebijakan, Program-program dan Kegiatan indikatif Inspektorat Kota Banjarbaru selama kurun waktu satu tahun sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah menyumbangkan pikiran dan tenaganya dalam penyusunan



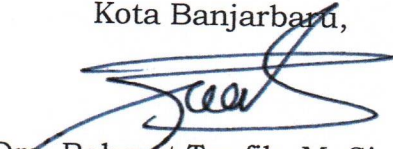
Rencana Kerja Inspektorat Kota Banjarbaru Tahun 2024 ini,  
kami mengucapkan terima kasih.

---

Banjarbaru, Juni 2024

INSPEKTUR,

Kota Banjarbaru,



Drs. Rahmat Taufik, M. Si  
NIP: 19700615 199003 1 006

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan   Pelayanan Perangkat Daerah.....	18
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	21
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	22
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masy.....	30
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	31
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	35
3.3 Program dan Kegiatan .....	37
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
BAB V PENUTUP	



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Kota Banjarbaru
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat
Tabel 2.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Banjarbaru Tahun 2024
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Kota Banjarbaru Tahun 2023
Tabel 3.2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Tabel 4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Inspektorat Tahun 2024

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja (RENJA) merupakan acuan setiap perangkat daerah (PD) dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Penyusunan RENJA berpedoman pada renstra Inspektorat Kota Banjarbaru dan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Penyusunan RENJA bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Rencana Kerja Inspektorat merupakan bagian yang utuh dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis (RENSTRA) Inspektorat. Keduanya merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dan peraturan menteri dalam negeri nomor 28 tahun 2009 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 23 tahun 2007 tentang pedoman tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintahan



daerah, dengan demikian program dan kegiatan pembangunan yang ada pada dokumen perencanaan diatur secara rinci dalam rencana kerja (RENJA).

Mengacu pada Pasal 137 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mengatur bahwa SKPD menyusun Renja SKPD. Oleh karena itu, Inspektorat Kota Banjarbaru berkewajiban menyusun Renja SKPD Tahun 2024 yang mengacu pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Banjarbaru Tahun 2023, Rancangan akhir Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Inspektorat Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, dan dalam rangka memecahkan masalah yang dihadapi. Selain itu juga memperhatikan Renja Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan. Sehingga diharapkan terwujudnya sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah.

## **1.2 Landasan Hukum**

Dasar hukum penyusunan Renja Inspektorat Kota Banjarbaru Tahun 2024 yaitu sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Banjarbaru(lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

- b. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- e. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
- f. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;



- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1312);
- i. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- j. Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 270/M.PPN/11/2012, Nomor SE-33/MK.02/2012, Nomor 050/4379A/SJ, Nomor SE-46/MPP-PA/11/2011 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);
- k. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
- l. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2010 tentang RPJPD Kota Banjarbaru Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2010 Nomor 11);

- m. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
- n. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru tahun 2016 nomor 16);
- o. Surat Edaran Wali Kota Banjarbaru Nomor 050/204-P2E/BAPPEDA Kota Banjarbaru tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) SKPD Kota Banjarbaru Tahun 2024;
- p. Keputusan Inspektur Kota Banjarbaru Nomor 012 tahun 2023 tentang Rencana Kerja Inspektorat Kota Banjarbaru Tahun 2024.

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

Renja Inspektorat Kota Banjarbaru Tahun 2024 dimaksudkan dalam rangka mencapai sasaran strategis Inspektorat Kota Banjarbaru Tahun 2024 melalui program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat. Sehingga pada akhirnya Renja ini dapat digunakan sebagai pedoman dan acuan resmi dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Inspektorat Kota Banjarbaru Tahun 2024.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Kota Banjarbaru Tahun 2024, bertujuan untuk menunjukkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dari berbagai



kegiatan, serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya pembangunan daerah.

Rencana Kerja disusun sebagai pedoman bagi :

- a. Penyusunan RKA dan penetapan kinerja Inspektorat Kota Banjarbaru serta tolak ukur pencapaian sasaran dan Indikator Kinerja Utama yang akan di capai setiap tahunnya.
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Inspektorat;
- c. Penyusunan kebijakan anggaran, program dan kegiatan Tahun 2024.

### **1.3 Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Renja Inspektorat Kota Banjarbaru Tahun 2024 yaitu sebagai berikut :

BAB I	1.1 Latar Belakang
Pendahuluan	1.2 Landasan Hukum
	1.3 Maksud dan Tujuan
	1.4 Sistematika Penulisan
BAB II	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja
Hasil Evaluasi Renja	Perangkat Daerah Tahun Lalu dan
Perangkat Daerah Tahun	Capaian Renstra Perangkat Daerah
Lalu	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat
	Daerah
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan
	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
	2.4 Review Terhadap Rancangan Awal
	RKPD Kota Banjarbaru
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan
	Kegiatan Masyarakat

BAB III  
Tujuan Dan Sasaran  
Perangkat Daerah

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan  
Nasional  
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat  
Daerah  
3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV  
Rencana Kerja Dan  
Pendanaan Perangkat  
Daerah

BAB V  
PENUTUP



## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Pengukuran Laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep *Value for Money*. Penggunaan konsep dimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai berikut :

- a. Indikator Masukan (*Input*), untuk mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya untuk melakukan suatu kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat dianalisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah

sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan.

- b. Indikator Keluaran (*Output*), merupakan indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik.
- c. Indikator Hasil (*Outcome*), merupakan indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan – kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah.

Sedangkan Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Hasil evaluasi atas Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra sampai dengan Tahun 2023 ditunjukkan pada tabel berikut ini :



**Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2023 Inspektorat Kota Banjarbaru**

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan (Renstra Inspektorat) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
				Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
PAWASAN									
INSPEKTORAT	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	2.5
PROGRAM PENYELENGGARAAN PAWASAN	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (level)	level 3	level 3	level 3	level 3	100%	level 3	level 3	100%
Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Kinerja yang ditindaklanjuti SKPD sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%
	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal yang Selesai Ditindaklanjuti SKPD Sesuai Ketentuan	90%	90%	90%	100%	100%	90%	100%	100%
	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal (BPK) yang Ditindaklanjuti oleh SKPD sesuai Ketentuan	85%	85%	85%	78%	92%	85%	78%	90%
Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	79 laporan	79 laporan	31 laporan	31 laporan	100%	33 laporan	51%	100%
Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	109 laporan	109 laporan	37 laporan	37 Laporan	100%	33 Laporan	61%	100%
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	36 dokumen	36 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	13 dokumen	60%	100%
Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Rekomendasi Ketidaksesuaian dengan Perundang-undangan yang Ditindaklanjuti SKPD Sesuai Ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	3 laporan	3 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	60%	100%
Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	129 laporan	129 laporan	43 laporan	43 laporan	100%	43 laporan	60%	100%
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENGAMPIAN DAN ASISTENSI	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (level)	level 3	level 3	level 3	level 3	100%	level 3	level 3	100%
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Ketersediaan dokumen kebijakan teknis di bidang fasilitas pengawasan	1 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	3 dokumen	100%



Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan (Renstra Inspektorat) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
				Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Kegiatan Perumusan Kebijakan di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	1 rekomendasi	3 rekomendasi	1 rekomendasi	1 rekomendasi	100%	3 rekomendasi	60%
Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Persentase Capaian Aksi Pencegahan Korupsi	90%	85%	85%	92,16%	100%	90%	100%
Kegiatan Pendampingan, Asistensi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	32 SKPD	32 SKPD	32 SKPD	32 SKPD	100%	32 SKPD	60%
Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2 kali	6 kali	2 kali	2 kali	100%	6 kali	60%
Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	32 SKPD	32 SKPD	32 SKPD	32 SKPD	100%	32 SKPD	60%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN NINTAHAN DAERAH KABUPATEN /	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	BB	BB	B	BB	100%	100%	100%
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaksanaan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan evaluasi kinerja SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah	7 dokumen	21 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	100%	21 dokumen	60%
Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	10 dokumen	30 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	100%	30 dokumen	60%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 orang	100%	70 orang	70 orang	100%	100%	100%
Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	3 dokumen	60%
Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100.00	20%	100%



Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan (Renstra Inspektorat) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
				Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Kegiatan Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan		12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	20%
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Peralatan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	6 paket	2 paket	2 paket	100%	6 paket	60%
Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 paket	15 paket	5 paket	5 paket	100%	15 paket	60%
Kegiatan Penyediaan Barang dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 paket	6 paket	2 paket	2 paket	100%	6 paket	60%
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	3 dokumen	60%
Kegiatan Penyelenggaraan rapat dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100.00	20%	100%
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100.00	20%	100%
Kegiatan Penyediaan Barang Milik Penunjang Urusan Pemerintahan	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Kegiatan Penyediaan Jasa Perawatan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Perorangan Dinas atau Kendaraan abatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	60%
Kegiatan Penyediaan Jasa Perawatan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Izinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	13 unit	13 unit	13 unit	13 unit	100%	13 unit	60%
Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 unit	12 unit	4 unit	4 unit	100%	12 unit	60%

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan (Renstra Inspektorat Tahun 2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
				Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
p- Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi dan Prasarana Pendukung Gedung atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 jenis	3 jenis	1 jenis	1 jenis	100%	1 jenis	1 jenis	3 jenis	60%



Capaian kinerja yang merupakan indikator yang menjelaskan tentang karakteristik penyelenggaraan SPIP ditingkat Pemerintah Kota Banjarbaru. Indikator ini mempunyai makna peringkat pencapaian penyelenggaraan SPIP berupa tingkat maturitas dan skor. Proses PM Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Pemerintah Kota Banjarbaru tahun 2022 sesuai dengan proses yang ditetapkan dalam pedoman (Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada K/L/D).

Untuk mendapatkan capaian indikator kinerja tersebut, cara yang digunakan yaitu berdasarkan laporan hasil penilaian (*Assesment*) Maturitas SPIP oleh BPKP.

Berdasarkan hasil Laporan Hasil Evaluasi Atas Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2022 Perwakilan BPKP Prov. Kalsel No. PE.09.03./LHP-446/PW16/3/2022 tanggal 28 Desember 2022, nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ialah Level 3 (Terdefinisi) dengan skor 3,007 atau memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada Level 3 (Terdefinisi). Artinya capaian untuk Indikator Kinerja Utama 100% sesuai dengan target pada Renstra Inspektorat Kota Banjarbaru. Tahun 2022 merupakan tahun ke-2 dalam Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). *Trend* ini menunjukkan optimisme untuk mencapai target di akhir tahun Renstra yaitu level 3 berdasarkan tabel tersebut di atas realisasi capaian Indikator Kinerja Utama untuk Maturitas Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sudah tercapai yaitu 100%.

Tingkat pencapaian kegiatan dari program-program Penyelenggaraan Urusan Penunjang Pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat Kota Banjarbaru, yaitu :

a. Program Penyelenggaraan Pengawasan indicator program tersebut yaitu Nilai Maturitas SPIP dengan capaian program level 3 artinya program tersebut sudah tercapai, terdiri dari 2 (dua) kegiatan, yaitu :

- o Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dengan realisasi anggaran 78,02% dengan indicator antara lain Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Kinerja yang ditindaklanjuti SKPD sesuai ketentuan capaian kinerja sebesar 100%, Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal yang Selesai Ditindaklanjuti SKPD Sesuai Ketentuan capaian kinerja sebesar 100% dan Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal (BPK) yang Ditindaklanjuti oleh SKPD sesuai Ketentuan dengan capaian kinerja sebesar 92%.



Kegiatan tersebut yang terdiri atas 3 sub kegiatan yaitu :

- Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah dengan realisasi anggaran 88,34%.
- Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah dengan realisasi anggaran 93,25%
- Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dengan realisasi anggaran 58.55%
- Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan dengan realisasi anggaran sebesar 88,60% dengan indicator capaian kinerja yaitu Persentase Rekomendasi Ketidaksesuaian dengan SAP yang Ditindaklanjuti SKPD Sesuai Ketentuan dengan hasil capaian sebesar 100%,  
Kegiatan tersebut yang terdiri atas 2 (dua) sub kegiatan yaitu :
  - Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah dengan realisasi anggaran 24,94%.

➤ Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dengan realisasi anggaran 92,31%

- b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan asistensi terdiri dari 2 (dua) kegiatan, capaian kinerja tersebut telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran adalah Level Kapabilitas APIP Kota Banjarbaru yang ditargetkan Level Kapabilitas APIP pada level 3 namun hasil realisasi capaian hanya level 3.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, kami telah melakukan evaluasi terhadap penilaian mandiri kapabilitas APIP Inspektorat Kota Banjarbaru, sebagaimana Laporan Hasil Evaluasi Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan nomor PE.09.03/LHP-436/PW16/6/2022 tanggal 23 Desember 2022 terlampir.

Hasil evaluasi menunjukkan tingkat kapabilitas APIP di lingkungan Inspektorat Kota Banjarbaru tahun 2022 berada pada level 3 (skala 1 – 5) dengan karakteristik *delivered*, yakni APIP telah melaksanakan aktivitas pengawasan (*assurance* dan *consulting*) sesuai dengan standar dan hasil pengawasan APIP telah berkualitas dalam memberikan keyakinan memadai atas ketaatan dan 3E, peringatan dini dan peningkatan



efektivitas manajemen risiko, serta perbaikan tata kelola.

Adapun Kegiatan dari program tersebut yaitu :

- Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan dengan realisasi anggaran 29,15% dengan indicator capaian Ketersediaan dokumen kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan 100%
- Kegiatan Pendampingan dan Asistensi dengan realisasi anggaran 83,42% dengan indicator capaian kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi SPIP yang Ditindaklanjuti SKPD Sesuai Ketentuan 100% dan indicator Persentase Capaian Aksi Pencegahan Korupsi sebesar 92,16%. Kegiatan tersebut terdiri dari 3(tiga) sub kegiatan yaitu
  - ✓ Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi dengan realisasi anggaran 88,32%
  - ✓ Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dengan realisasi anggaran 83,62%

- ✓ Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas dengan realisasi anggaran 74,30%

Terkait dengan faktor-faktor tersebut berikut ini merupakan tindakan yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas APIP baik melalui keikutsertaan dalam Diklat Teknis dan substantif maupun melalui Pelatihan Kantor Sendiri (PKS);
2. Melakukan pemantauan yang intensif pada setiap elemen-elemen untuk dilakukan updating data dalam pemenuhan Kapabilitas APIP untuk mencapai level 3.
3. Mempertegas kembali komitmen SKPD dalam menindak lanjuti rekomendasi BPK yang belum sesuai/dalam proses serta yang belum ditindaklanjuti. dan melakukan koordinasi dengan BPK dan Inspektorat;
4. Melakukan pemantauan yang intensif melalui kegiatan monitoring tindaklanjut temuan pengawasan;
5. Melakukan koordinasi dengan optimal dengan SKPD terkait sehubungan dengan tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK.



efektivitas manajemen risiko, serta perbaikan tata kelola.

Adapun Kegiatan dari program tersebut yaitu :

- Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan dengan realisasi anggaran 29,15% dengan indicator capaian Ketersediaan dokumen kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan 100%
- Kegiatan Pendampingan dan Asistensi dengan realisasi anggaran 83,42% dengan indicator capaian kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi SPIP yang Ditindaklanjuti SKPD Sesuai Ketentuan 100% dan indicator Persentase Capaian Aksi Pencegahan Korupsi sebesar 92,16%. Kegiatan tersebut terdiri dari 3(tiga) sub kegiatan yaitu
  - ✓ Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi dengan realisasi anggaran 88,32%
  - ✓ Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dengan realisasi anggaran 83,62%

**Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Banjarbaru**

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Renstra			Realisasi Capaian		Proyeksi	
	Tahun 2021 (n-2)	Tahun 2022 (n-1)	Tahun 2023 (n)	Tahun 2021 (n-2)	Tahun 2022 (n-1)	Tahun 2022 (n)	Tahun 2023 (n+1)
Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (level)	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (level)	Level 2	Level 2	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3



Berdasarkan Keputusan Inspektur Kota Banjarbaru tentang Perubahan Kedua atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021-2026, ditetapkan 2 (dua) IKU sebagai tolak ukur kinerja Inspektorat Kota Banjarbaru. Pada tahun 2022 kinerja Inspektorat sudah memenuhi target, yang artinya kinerja yang ditargetkan telah tercapai 100%.

### **Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja Inspektorat dan hal-hal kritis terkait dengan pengawasan, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pengawasan, dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, tantangan dan peluang serta isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan penting/strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Adapun permasalahan - permasalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan pada tahun 2022 antara lain :

- a. Masih banyak temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan yang belum ditindaklanjuti;
- b. Belum adanya sanksi yang tegas terhadap pengelolaan kinerja dan pengendalian internal yang kurang baik;
- c. Kualitas pelayanan publik masih harus ditingkatkan;
- d. Prosedur pengawasan belum dijalankan dengan baik;
- e. Komitmen dan motivasi APIP masih perlu ditingkatkan.

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, dapat dirumuskan isu strategis sektor pengawasan yaitu :

- 1. Kurangnya tingkat kepatuhan SKPD terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
- 2. Kurang maksimalnya peran APIP sebagai peran internal pemerintah daerah untuk memberikan solusi perbaikan jangka panjang bagi SKPD.



## **Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Telaahan terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarbaru dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Inspektorat dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Inspektorat dengan arahan Kepala daerah terkait dengan prioritas program/kegiatan serta pagu indikatif yang disediakan untuk Inspektorat berdasarkan rancangan awal RKPD.

Proses yang dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Secara keseluruhan, hasil analisis kebutuhan yang diajukan dalam usulan Renja Inspektorat Tahun 2024 sesuai dengan rancangan awal RKPD Kota Banjarbaru Tahun 2024. Rumusan rencana program dan kegiatan yang diusulkan Inspektorat Kota Banjarbaru pada rancangan awal RKPD tahun 2024 seperti disajikan pada pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Banjarbaru Tahun 2024

Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Banjarbaru Tahun 2024

Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan					
Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
PENGAWASAN INSPEKTORAT				13,011,059,990					16,589,189,830
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (level)	level 3	2,455,646,750	1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (level)	level 3	4,123,015,100
Kegiatan Penyelenggaraan pengawasan Internal	Banjarbaru	1.Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Kinerja yang ditindaklanjuti SKPD sesuai ketentuan	100%	1,055,445,000	1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Banjarbaru	1.Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Kinerja yang ditindaklanjuti SKPD sesuai ketentuan	100%	2,055,451,700
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Banjarbaru	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	12 dokumen		1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Banjarbaru	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	50 laporan	Rp 876,452,000.00
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan APIP	Banjarbaru	2. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal (BPK) yang Ditindaklanjuti oleh SKPD sesuai Ketentuan	85%	324,455,000	2. Monitoring dan Evaluasi Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Banjarbaru	2.Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal (BPK) yang Ditindaklanjuti oleh SKPD sesuai Ketentuan	85%	Rp 324,455,000.00
	Banjarbaru	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan APIP	12 dokumen			Banjarbaru	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan APIP	12 dokumen	
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Banjarbaru	3. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal yang Selesai Ditindaklanjuti SKPD Sesuai Ketentuan	85%	282,090,000	3. Pengawasan Keuangan Daerah	Banjarbaru	3. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal yang Selesai Ditindaklanjuti SKPD Sesuai Ketentuan	90%	Rp 854,544,700.00
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	12 dokumen				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	127 laporan	



Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
Kegiatan Penyelenggaraan pengawasan dengan Tujuan tertentu		Persentase Rekomendasi Ketidaksesuaian Perundang-undangan yang Ditindaklanjuti SKPD Sesuai Ketentuan	100%	1,400,201,750	2.Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Persentase Rekomendasi Ketidaksesuaian dengan Perundang-undangan yang Ditindaklanjuti SKPD Sesuai Ketentuan	100%	2,067,563,400
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah		Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1 Laporan	26,917,000	1. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah		Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1 Laporan	Rp 26,916,800.00
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Banjarbaru	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	43 laporan	1,373,284,750	2.Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Banjarbaru	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	55 laporan	Rp 2,040,646,600.00
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (level)	Level 3	1,679,688,400	2.PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (level)	Level 3	1,464,536,850
Pendampingan dan asistensi		Persentase capaian aksi pencegahan Korupsi	90%	755,898,400	1.Pendampingan dan Asistensi		Persentase capaian aksi pencegahan Korupsi	90%	999,746,850
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	32 SKPD	124,473,400	1.Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	32 SKPD	Rp 217,629,400.00
Pendampingan, Asistensi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	32 SKPD	228,931,500	2.Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	32 SKPD	354,453,000
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2 Kegiatan	402,493,500	3. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2 Kegiatan	Rp 427,664,450.00



Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
2. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Banjarbaru	Ketersediaan dokumen kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan (Ada/Tidak)	1 dokumen	923,790,000	2. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Banjarbaru	Ketersediaan dokumen kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan (Ada/Tidak)	1 dokumen	Rp 464,790,000.00
1.1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Banjarbaru	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	1 rekomendasi		1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Banjarbaru	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	1 rekomendasi	
3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Banjarbaru	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	100%	779,706,880	3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Banjarbaru	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	100%	2,905,620,170
		Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	BB	8,096,017,960			Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	BB	8,096,017,710
1. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Banjarbaru	cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	148,885,380	1. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Banjarbaru	cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	159,685,350
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	148,885,380	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	Rp 159,685,350.00
2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Banjarbaru	Cakupan layanan Administrasi Umum yang difasilitasi	100%	353,806,500	2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Banjarbaru	Cakupan layanan Administrasi Umum yang difasilitasi	100%	606,754,500
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	13,052,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	Rp 16,000,000.00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 paket	115,867,500	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	Rp 115,867,500.00



Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	2,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	2,000,000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 paket	12,219,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 paket	12,219,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	210,668,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	Rp 460,668,000.00
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Banjarbaru	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi Baik	100%	254,315,000	3. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Banjarbaru	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi Baik	100%	521,087,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Banjarbaru	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	50,699,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Banjarbaru	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	50,699,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Banjarbaru	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	185,068,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Banjarbaru	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	185,068,000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Banjarbaru	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 unit	10,228,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Banjarbaru	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 unit	Rp 27,000,000.00



Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Banjarbaru	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Jenis	8,320,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Banjarbaru	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Rp 258,320,000.00
Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Banjarbaru	Presentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja SKPD	BB	61,000,000	4. Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Banjarbaru	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja SKPD	BB	61,000,000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Banjarbaru	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah	7 dokumen	36,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Banjarbaru	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	36,000,000
Koordinasi dan Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Banjarbaru	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10 Laporan	25,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Banjarbaru	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	25,000,000
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Presentase Laporan Keuangan yang disusun sesuai ketentuan	100%	8,035,017,960	5. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan	100%	8,035,017,710
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Banjarbaru	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 orang	8,011,059,160	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Banjarbaru	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 orang	Rp 8,011,059,160.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Banjarbaru	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	15,432,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Banjarbaru	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Rp 15,432,000.00



Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Banjarbaru	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	12 laporan	8,526,800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Banjarbaru	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	12 laporan	Rp 8,526,550,00
h. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Cakupan layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	22,700,000	6. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Banjarbaru	Cakupan layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	22,700,000
Sub- Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	12 laporan	22,700,000	Sub- Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Banjarbaru	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	12 laporan	22,700,000
i. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Banjarbaru	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian yang difasilitasi	100%	459,000,000
Sub- Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					Sub- Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Banjarbaru	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	27 ASN	Rp 459,000,000,00
h. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Banjarbaru	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	100%	Rp 1,136,393,320,00
Sub- Kegiatan Pengadaan Mebel					Sub- Kegiatan Pengadaan Mebel	Banjarbaru	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	Rp 236,800,000,00





### **Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Kajian terhadap usulan program dan kegiatan merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait dengan kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pembangunan pada tahun yang direncanakan sesuai tugas dan fungsi SKPD terkait.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Inspektorat Kota Banjarbaru merupakan lembaga pengawas intern di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru. Oleh karena itu, Inspektorat Kota Banjarbaru secara tidak langsung tidak menerima usulan program dan kegiatan dari masyarakat. Akan tetapi, Inspektorat Kota Banjarbaru tetap berkaitan dan berhubungan dengan masyarakat melalui pengaduan masyarakat, baik yang dilimpahkan oleh Walikota Banjarbaru maupun aduan masyarakat yang langsung ditujukan ke Inspektorat langsung. Kegiatan tersebut tertuang dalam kegiatan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.

### **BAB III**

#### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

##### **Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 untuk menetapkan perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 meliputi :

1. Pemeriksaan Kinerja terhadap Program/kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah tahun 2023 dengan sasaran program/ kegiatan yang memiliki risiko tinggi.



2. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yaitu:
  - a. Pemeriksaan investigasi dengan sasaran penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi;
  - b. Penjatuhan sanksi administrasi kepada bupati/wali kota, dan DPRD oleh inspektorat propinsi selaku perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sesuai dengan kewenangan; dan
  - c. Perhitungan kerugian keuangan Negara/ daerah dengan sasaran kasus kerugian Negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan Negara/daerah.
3. Pengawasan yang bersifat mandatory/ harus dilakukan oleh inspektorat daerah, meliputi :
  - a. Kinerja Rutin Pengawasan
    - 1) Reviu rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD)
    - 2) Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan ( RKPD, Renja PD, KUA, PPAS dan RKA SKPD termasuk perubahan).
    - 3) Reviu Laporan Keuangan
    - 4) Reviu Laporan Kinerja

- 5) Reviu laporan penyelenggaran pemerintah daerah (LPPD)
  - 6) Pemeriksaan atas penagihan penerimaan Negara bukan pajak
  - 7) Reviu dana alokasi khusus (DAK) Fisik
  - 8) Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
  - 9) Monitoring penyerapan anggaran/ pemerintah kas
  - 10) Monev tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK
- b. Pengawasan Prioritas Nasional
- 1) Tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas intern
  - 2) Operasional sapu bersih pungutan liar
  - 3) Evaluasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (responsive gender)
  - 4) Dana desa
  - 5) BOK
4. Pengawalan Reformasi Birokrasi
- a. Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dengan sasaran menyakinkan data yang tertuang dalam dokumen akurat dan revelan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi;



- b. Asistensi pembangunan reformasi birokrasi dengan sasaran pendampingan kepada perangkat daerah dalam membangun sub area penguatan pengawasan, meliputi :
  - 1) System pengendalian intern pemerintah;
  - 2) Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah;
  - 3) Verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggaran Negara/ laporan harta kekayaan aparatur sispil Negara;
  - 4) Penilaian internal zona integritas;
  - 5) Penanganan benturan kepentingan;
  - 6) Penanganan laporan pengaduan (*whistle blower system*; dan
  - 7) Penanganan penagaduan masyarakat.

## 5. Penegakan Integritas

- a. Dukungan pelaksanaan survey penilaian integritas dengan sasaran menyakinkan kesiapan pemerintah daerah dan tersedianya alokasi anggaran secara memadai; dan
- b. Monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi dengan sasaran aksi pencegahan korupsi dengan sasaran aksi pencegahan dan penindakan korupsi

terintegritas yang dikoordinasikan oleh KPK dan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh Tim Stranas PK.

6. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah ;
  - a. Penerapan Manajemen Risiko;
  - b. Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko;
  - c. Audit Kinerja;
  - d. Audit Investigasi;
  - e. Pemeriksaan DAK Fisik;
  - f. Pendidikan berjenjang Fungsional P2UPD dan Auditor dan
  - g. Pendidikan Sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Tujuan dan sasaran Renja Inspektorat Kota Banjarbaru ialah untuk memberikan arah bagi SKPD selaku pelaksana urusan pemerintah daerah dalam upaya mendukung pelaksanaan visi dan misi Pembangunan Daerah. Berdasarkan evaluasi hasil pelaksanaan Renja Inspektorat tahun 2022 dan tahun berjalan (2023), serta didasarkan atas perumusan permasalahan dan isu-isu penting/ strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi pengawasan pada tahun 2021, maka tujuan dan sasaran pengawasan tahun 2023 yaitu sebagai berikut.



**Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Kota Banjarbaru Tahun 2024**

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Indeks Penerapan Manajemen Resiko	Meningkatnya penyelenggaraan Pengawasan pemerintahan daerah	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (level)	Level 3
		Meningkatnya Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (level)	Level 3

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Dalam menentukan program dan kegiatan pada tahun 2023 utamanya mempertimbangkan kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2023 dan isu-isu terkait pemberantasan korupsi.

Sehubungan dengan adanya Permendagri 90 tahun 2019 maka terdapat penggabungan beberapa kegiatan, yaitu sebagai berikut :

- 1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
  - a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
    - o Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - o Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
    - o Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - o Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
    - o Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD



- c) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
  - o Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - o Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - o Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - o Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - o Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- d) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan :
  - o Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- e) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan :
  - o Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - o Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - o Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - o Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- f) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - o Sub- Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

2) PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

- a) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dengan sub kegiatan :
  - o Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
  - o Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
  - o Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
- b) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu dengan sub kegiatan :
  - o Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
  - o Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

3) PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

- a) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan dengan sub kegiatan :



- Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
- b) Kegiatan Pendampingan dan Asistensi dengan sub kegiatan :
  - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
  - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
  - Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Berikut ini dijabarkan rumusan rencana program dan kegiatan pada tahun 2023 dan prakiraan maju tahun 2024.





Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
		Predikat akuntabilitas Kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan	- Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Guntung Palat	BB level	12 Laporan	100 %	8.526.550,00	Laporan Bulanan 1 s/d 12 bulan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	9.379.000,00
6 01 01 2 03												
6 01 01 2 03 05									22.700.000,00			25.000.009,00
		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	- Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Guntung Palat	100 %	12 Laporan	100 %	22.700.000,00	Laporan Rekonsiliasi Bulanan 1 s/d 12 bulan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	25.000.009,00
6 01 01 2 05												
6 01 01 2 05 09									459.000.000,00			459.000.000,00
		<b>Administrasi Kepegawayaan Perangkat Daerah</b>	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawayaan yang difasilitasi	- Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Guntung Palat	-	27 Orang	100 %	459.000.000,00	Org yg mengikuti Diklat (ASN)	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	459.000.000,00
6 01 01 2 06												
6 01 01 2 06 02									666.754.500,00			414.280.000,00
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	- Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Guntung Palat	100 %	2 Paket	100 %	16.000.000,00	1. Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 2. Alat Listrik	Jumlah Paket Peralatan dan Pengiriman Kantor yang Disediakan	16.000.000,00
6 01 01 2 06 04												
		<b>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</b>	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	- Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Guntung Palat	100 %	4 Paket	100 %	115.867.500,00	1. ATK, 2. Makmin Rapat 3. Tamu 4. Natura	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	153.000.000,00
6 01 01 2 06 05												
		<b>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b>	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	- Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Guntung Palat	100 %	6 Paket	100 %	12.219.000,00	Cetak Blanko Disposisi, Cetak Map Kop SKPD, Cetak kartu Kendali Surat Masuk NCR, Fotocopy, Cetak Spanduk	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12.300.000,00
6 01 01 2 06 06												
		<b>Penyediaan Bahan Bicara dan Peraturan Perundang-undangan</b>	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	- Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Guntung Palat	100 %	12 Dokumen	100 %	2.000.000,00	Dokumen Bulanan	Jumlah Dokumen Bahan Bicara dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2.200.000,00

Kode		Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
			Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Target Capaian Kinerja		Sumber Dana	Tolok Ukur	Target			
								Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Guntung Pakkat	100 %	12 Laporan	100 %	460.668.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	230.780.000,00
6	01	01	2.07	05	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	- Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Guntung Pakkat	100 %	6 Unit	100 %	1.136.393.320,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	236.800.000,00
6	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	- Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Guntung Pakkat	100 %	106 Unit	100 %	899.593.320,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	135 Unit	899.600.000,00



Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Program		Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Profilan Misi Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	
												Tolok Ukur	Target
6 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Penujangan Usuran Pemeliharaan Daerah	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan Penyediaan Jasa Penujangan Pemerintah Daerah yang difasilitasi	- Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Guntung Pakkat	100 %	12 Laporan	100 %	159.685.350,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Honor Bulanan jasa pelayanan umum	12 Laporan	169.600.000,00
6 01 01 2.08 04													
6 01 01 2.09 01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujangan Usuran Pemeliharaan Daerah	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Cakupan Barang Penujangan Usuran Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	- Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Guntung Pakkat	100 %	1 Unit	100 %	521.087.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mobil Inspektur	1 Unit	54.450.000,00
6 01 01 2.09 01													
6 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Perizinannya	Cakupan Barang Penujangan Usuran Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	- Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Guntung Pakkat	100 %	13 Unit	100 %	185.068.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Mobil Operasional 2. Kendaraan Dinas Es IV 3. Kendaraan Dinas Es III	13 Unit	208.700.000,00
6 01 01 2.09 02													
6 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Cakupan Barang Penujangan Usuran Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	- Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Guntung Pakkat	100 %	4 Unit	100 %	27.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Servis komputer, printer	4 Unit	11.250.000,00
6 01 01 2.09 06													
6 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Cakupan Barang Penujangan Usuran Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	- Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Guntung Pakkat	100 %	1 Unit	100 %	258.320.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	rehab gedung	1 Unit	258.320.000,00
6 01 01 2.09 09													
6 01 02 2.01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal							4.123.015.100,00				3.785.490.300,00
6 01 02 2.01 01													

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
		Capaian Program		Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	
		Keluaran Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan	Tolok Ukur
5 01 01 2 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang difasilitasi	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi	- Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Guntung Palak	100 %	12 Laporan	100 %	159.685.350,00	Honor Bulanan jasa pelayanan umum	12 Laporan	169.600.000,00
5 01 01 2 08 04												
5 01 01 2 09	Peneliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	- Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Guntung Palak	100 %	1 Unit	100 %	521.087.000,00	Mobil Inspektur	1 Unit	532.720.000,00
5 01 01 2 09 01												
5 01 01 2 09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, atau Penggantian atau Pengeluaran, Pengadaan barang atau jasa, dan lain-lain yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	- Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Guntung Palak	100 %	13 Unit	100 %	185.068.000,00	1. Mobil Operasional 2. Kendaraan Dinas Es IV 3. Kendaraan Dinas Es III	13 Unit	208.700.000,00
5 01 01 2 09 06												
5 01 01 2 09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	- Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Guntung Palak	100 %	4 Unit	100 %	27.000.000,00	Servis komputer, printer	4 Unit	11.250.000,00
5 01 01 2 09 09												
5 01 01 2 09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	- Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Guntung Palak	100 %	1 Unit	100 %	258.320.000,00	rehab gedung	1 Unit	258.320.000,00
5 01 02 2 01												
5 01 02 2 01	PROGRAM PENYELANGGARAAN PENGAWASAN	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah							4.123.015.100,00			3.785.490.300,00
5 01 02 2 01 01												
5 01 02 2 01 01									2.095.451.700,00			1.715.235.700,00









Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
		Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (level)	Jumlah Peringkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Persentase Capaian Aksi Pencegahan Korupsi	- Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Level	32 perangkat daerah	90 %	354.453.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	32 perangkat daerah	354.453.000,00
6 01 03 2.02 03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (level)	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Persentase Capaian Aksi Pencegahan Korupsi	- Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Level	2 Kegiatan	90 %	427.664.450,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2 kegiatan	431.145.000,00
6 01 03 2.02 04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Pencegahan Integritas	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (level)	Jumlah Peringkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Pencegahan Integritas	Persentase Capaian Aksi Pencegahan Korupsi	- Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Level	32 perangkat daerah	90 %	217.629.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Pencegahan Integritas	32 perangkat daerah	217.629.400,00
TOTAL									16.589.189.890,00				17.355.126.718,00

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana kerja dan pendanaan pada Inspektorat Kota Banjarbaru Tahun 2024 ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1

Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2024  
Inspektorat Kota Banjarbaru



**Tabel 4.1**  
**Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2024**

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Lokasi	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Rupiah)	
	<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>					
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Banjarbaru	BB	Rp 8,096,017,710.00	
1		Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	Banjarbaru	100%	Rp 2,905,620,170.00	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja SKPD	Banjarbaru	100%	Rp 61,000,000.00	APBD
	Sub-Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Banjarbaru	7 dokumen	Rp 36,000,000	
	Sub-Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Banjarbaru	10 Laporan	Rp 25,000,000	
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan	Banjarbaru	100%	Rp 8,035,017,710.00	APBD
	Sub-Kegiatan Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Banjarbaru	70 orang	Rp 8,011,059,160.00	
	Sub- Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Banjarbaru	1 laporan	Rp 15,432,000.00	
	Sub- Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Banjarbaru	12 laporan	Rp 8,526,550.00	
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Barang Milik Daerah yang difasilitasi	Banjarbaru	100%	Rp 22,700,000.00	
	Sub- Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Banjarbaru	12 laporan	Rp 22,700,000.00	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian yang difasilitasi	Banjarbaru	100%	Rp 459,000,000.00	
	Sub- Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Banjarbaru	27 orang	Rp 459,000,000.00	



No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Lokasi	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Rupiah)	
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	Banjarbaru	100%	Rp 606,754,500.00	APBD
	Sub- Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Banjarbaru	2 paket	Rp 16,000,000.00	
	Sub- Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Banjarbaru	4 paket	Rp 115,867,500.00	
	Sub- Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Banjarbaru	6 paket	Rp 12,219,000.00	
	Sub- Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Banjarbaru	12 dokumen	Rp 2,000,000.00	
	Sub- Kegiatan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Banjarbaru	12 laporan	Rp 460,668,000.00	
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi	Banjarbaru	100%	Rp 159,685,350.00	APBD
	Sub- Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Banjarbaru	12 laporan	Rp 159,685,350.00	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Banjarbaru	100%	Rp 1,136,393,320.00	
	Sub- Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Banjarbaru	7 Unit	Rp 236,800,000.00	
	Sub- Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Banjarbaru	135 Unit	Rp 899,593,320.00	
6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	Banjarbaru	100%	Rp 521,087,000.00	APBD
	Sub- Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Banjarbaru	1 unit	Rp 50,699,000.00	
	Sub- Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Banjarbaru	13 unit	Rp 185,068,000.00	
	Sub- Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Banjarbaru	4 unit	Rp 27,000,000.00	



No.	Programy/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Lokasi	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Rupiah)	
	Sub- Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Banjarbaru	1 unit	Rp 258,320,000.00	
2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (level)</b>	Banjarbaru	level 3	Rp 4,123,015,100.00	
1	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Kinerja yang ditindaklanjuti SKPD sesuai ketentuan	Banjarbaru	100%	Rp 876,452,000.00	APBD
		Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal yang Selesai Ditindaklanjuti SKPD Sesuai Ketentuan	Banjarbaru	90%	Rp 854,544,700.00	
		Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal (BPK) yang Ditindaklanjuti oleh SKPD sesuai Ketentuan	Banjarbaru	85%	Rp 324,455,000.00	
	Sub- Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Banjarbaru	50 laporan	Rp 876,452,000.00	
	Sub- Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Banjarbaru	127 laporan	Rp 854,544,700.00	
	Sub- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Banjarbaru	12 dokumen	Rp 324,550,000.00	
2	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>	Persentase Rekomendasi Ketidaksesuaian dengan Perundang-undangan yang Ditindaklanjuti SKPD Sesuai Ketentuan	Banjarbaru	100%	Rp 2,067,563,400.00	APBD
	Sub- Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Banjarbaru	1 laporan	Rp 26,916,800.00	
	Sub- Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Banjarbaru	55 laporan	Rp 2,040,646,600.00	
3	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	<b>Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (level)</b>	Banjarbaru	level 3	Rp 1,464,536,850.00	
1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Ketersediaan dokumen kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan	Banjarbaru	1 dokumen	Rp 464,790,000.00	APBD

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Lokasi	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Dalam Rupiah)	
	Sub- Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Banjarbaru	1 rekomendasi	Rp 464,790,000.00	
2	<b>Kegiatan Pendampingan dan Asistensi</b>	Persentase Capaian Aksi Pencegahan Korupsi	Banjarbaru	90%	<b>Rp 999,746,850.00</b>	APBD
	Sub- Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Dacrah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Banjarbaru	32 SKPD	354,453,000	
	Sub- Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Banjarbaru	2 Kegiatan	Rp 427,664,450.00	
	Sub- Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Dacrah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Banjarbaru	32 SKPD	Rp 217,629,400.00	



## **BAB V**

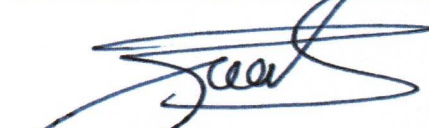
### **PENUTUP**

Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Kota Banjarbaru tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 tahun bertujuan untuk memberikan arah bagi Inspektorat selaku pelaksana urusan pemerintah daerah dalam upaya mendukung pelaksanaan visi dan misi Pembangunan Kota Banjarbaru.

Renja Inspektorat tahun 2024 dimaksudkan sebagai pedoman resmi bagi Inspektorat dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2024 dan sebagai acuan pencapaian kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat kedepan. Rencana Kerja (Renja) disusun dan ditetapkan untuk mensinergikan rencana pembangunan tahunan SKPD dengan rencana pembangunan tahunan daerah, dan nasional, sehingga menghasilkan perencanaan tahunan yang bermutu, akuntabel, dan tepat waktu.

Banjarbaru,

INSPEKTUR KOTA BANJARBARU



Drs. RAHMAT TAUFIK, M.Si  
NIP. 19700615 199003 1 006